

## HUBUNGAN GENDER DAN ETNISITAS : BEBERAPA KASUS DI DUNIA KETIGA

Widjajanti M. Santoso<sup>1</sup>

---

---

### Abstract

*The article is a description of several cases about third world women in changing situation. The women experience political conflict or migration to other places, therefore problem of identity become an important subject. As a general social context, identity is important as society becomes heterogenous. To some extent, this context give opportunities for women to participate in public sphere. Whereas women has gained more space in public, there are always a movement to hold them back in their privat sphere. This is a specific problem of third world women, whether in their countries or in other countries.*

### Pendahuluan

Peristiwa lengsernya Suharto sebagai presiden mudah diingat. Setiap peristiwa nasional, seperti Sidang MPR hampir selalu diikuti oleh ucapan, pidato dan poster mengenai Orde Baru, yang beberapa di antaranya menyentuh Suharto. Akan tetapi, peristiwa yang menyertai hal tersebut, seperti orang-orang yang hilang atau meninggal, penjarahan, dan korban perkosaan pada beberapa perempuan Cina, dengan cepat dilupakan.

Ada dua permasalahan yang muncul dalam kaitannya dengan peristiwa yang terjadi pada bulan Mei 1998 tersebut, terutama yang terkait dengan 'isu' perkosaan terhadap beberapa perempuan Cina. Pertama, mengapa beberapa perempuan mengalami perkosaan? Apakah karena perempuan merupakan makhluk yang lemah, sehingga dapat ditarik beberapa keuntungan dari kelemahan mereka? Bukankah karena kelemahan yang dimiliki mereka justru perlu dilindungi? Kedua, mengapa perkosaan itu terjadi pada perempuan-perempuan Cina? Apakah ada kaitannya antara masalah gender dan masalah etnisitas, sehingga perlu ada kajian mengenai etnisitas dalam membahas tentang gender?

Gender adalah pengkategorian yang memperlihatkan adanya konstruksi sosial yang berbeda antara lelaki dan perempuan dibedakan atas dasar kebiasaan, persepsi, dan gaya hidupnya. Sedangkan etnisitas adalah pengkategorian yang mengacu pada identitas seseorang atau sekelompok orang atas tanda-tanda primordial tertentu<sup>2</sup>. Walaupun keduanya

---

<sup>1</sup> Peneliti Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI

<sup>2</sup> Etnis dan ras tidak dibedakan sehingga keduanya dipakai secara bersamaan. Seperti penggunaan kategori *Black Feminist* tidak mengacu secara spesifik pada perempuan berkulit hitam, di mana hitam menjadi masalah rasial seperti di

didasarkan pada kategorisasi yang berbeda, namun dalam tulisan ini dicoba untuk dibuat ilustrasi beberapa kasus yang menghubungkan masalah etnisitas dan gender. Dengan ilustrasi ini diharapkan dapat memberi masukan tentang adanya problematika etnis yang secara spesifik dapat menjadi kajian gender.

Sebagai upaya awal untuk melihat hubungan antara etnisitas dan gender, ilustrasi dalam tulisan ini difokuskan pada beberapa kasus yang melibatkan perempuan dunia ketiga, baik yang berada di negaranya sendiri maupun yang bermigrasi ke negara lain. Ilustrasi pertama, memperlihatkan masalah gender dan etnisitas yang terjadi di Negara Dunia Ketiga, dan yang terjadi pada perempuan dari Dunia Ketiga di negara tujuan imigrasi. Ilustrasi kedua, memperlihatkan pembahasan pendekatan yang diajukan oleh pemerhati masalah gender, terhadap konsep yang dikembangkan oleh feminis sendiri. Dalam bagian ini juga dimasukkan tentang *black feminist* yang dalam perkembangannya melingkupi pula masalah perempuan dari Dunia Ketiga.

### Beberapa Ilustrasi

“*The Power Paradoxes in Muslim Women’s Majales: North-West Pakistani Mourning Rituals as Sites of Contestation Over Religious Politics*” adalah artikel yang membahas mengenai komunitas Shia di Pakistan. Pembukaannya yang menyatakan bahwa perempuan memiliki peran dalam gerakan pemberontakan bahkan dalam revolusi (Sign,1998:391) merupakan hal yang menarik dari makalah ini. Perempuan selain dipandang sebagai simbol sebuah gerakan, juga muncul dalam konteks feminitas yang tradisional dan tertutup. Perempuan menunjukkan kepatuhan yang tinggi terhadap gerakan atau negara, tetapi tidak mengekspresikan aspirasi pribadi yang bersangkutan<sup>3</sup>. Pandangan seperti ini muncul sebagai asumsi umum perspektif perempuan (Barat) terhadap perempuan yang berasal dari kelompok Muslim, Timur Tengah dan fundamentalis. Perempuan yang berasal dari kelompok ini cenderung dilihat sebagai perempuan yang bersikap pasif, tidak memiliki pendapat pribadi dan tidak memiliki status sebagai individu yang boleh memiliki pendapat (Sign,1998:392).

Tulisan pada majalah Sign tersebut merupakan hasil sebuah penelitian yang meneliti tentang ritual *Majales*, yaitu ritual Shia pada bulan Muharam untuk memperingati kematian Imam Husein. Ritual itu dilakukan pada pagi hari dan penuh dengan ungkapan kesedihan dan pujaan (Sign,1998:393). Walaupun perempuan melakukan ritual dalam batas-batas

---

Amerika. Pengkategorian tersebut mengacu pada perempuan kulit berwarna seperti orang Asia (Abbott dan Wallace,1997).

<sup>3</sup> Terjemahan bebas dari paragraph pertama artikel yang bersangkutan.

yang telah ditentukan oleh agama, namun banyak ketrampilan sosial yang dipelajari oleh perempuan.

Walaupun ritual ini diikuti lelaki dan perempuan namun pelaksanaannya dilakukan secara terpisah antara keduanya. Dalam kelompok perempuan, mereka belajar untuk tampil dan berani memimpin, bahkan melakukan upaya-upaya untuk menerima kelompok Shia dari etnis lain, seperti kelompok India yang berbahasa Urdu sebagai kelompok dengan pengikut yang terbesar diupayakan untuk menerima, kelompok India yang berbahasa Pukhtun dan Qizalbash (kelompok yang berbahasa Persia) (Sign,1998:193-4). Dalam ritual *Majales*, perempuan tidak saja menikmati hubungan sosial, tetapi juga mobilitas karena kelompok Shia mengadakan ritual berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya

Batas-batas etnis dan agama merupakan masalah di Pakistan, karena adanya proses pemisahan antara India dan Pakistan. Proses pemisahan tersebut telah meletakkan agama sebagai identitas yang mengaburkan perbedaan etnis, yaitu agama menjadi pembeda atau penyama identitas seseorang, terlepas apakah mereka berasal dari etnis yang sama. Sebagai akibatnya perbedaan antara Sunni dan Shia menjadi kentara, apalagi dengan minoritas Hindu. Prosesi Muharam sebelum terjadinya pemisahan India dan Pakistan merupakan peristiwa ritual di komunitas, karena mereka yang beragama Hindu juga turut berpartisipasi. Begitu pula pada kelompok yang berbahasa Persia – Qizilbash yang tidak pernah mengalami gangguan dari kelompok Hindu (Sign,1998:404-5). Karena itu akibat pemisahan tersebut muncul sikap ‘fundamental’ dalam beragama, sehingga di Pakistan tidak hanya terjadi gerakan fundamental pada agama Hindu tetapi juga agama Islam, baik Sunni maupun Shia. Selain itu juga muncul gerakan-gerakan sektarian yang dimediasikan oleh ‘*Urdu media, kinship networks, visiting and clerical contact*’ (Sign,1998:403).

Dengan adanya fundamentalisme beragama tersebut maka, proses ritual *Majales* yang awalnya dilakukan secara terpisah oleh kelompok-kelompok Shia yang ada, saat ini dilakukan secara bersamaan oleh kelompok-kelompok tersebut secara bergantian. Hal ini juga didukung dengan kemudahan transportasi yang merupakan salah satu alat yang memungkinkan terjadinya mobilitas (Sign,1998:410). Begitu pula hubungan sosial seperti pernikahan antar kelompok, baik yang terjadi di India ataupun Pakistan, ataupun pendidikan agama yang terdapat pada komunitas yang bersangkutan, merupakan tanda terjadinya hubungan antar kelompok Shia.

Dengan demikian kegiatan kelompok-kelompok tersebut tidak berlaku eksklusif. Mereka mencoba menarik perempuan dari kelompok lain, bahkan menjadi kontrol terhadap kedatangan dan partisipasi perempuan. Selain merupakan kelompok ritual agama, *Majales* juga menjadi arena yang aman, karena dalam melakukan ritual mereka tidak berorientasi pada benar-tidaknya cara-cara ritual, sehingga memberikan

kesempatan bagi perempuan lain untuk berpartisipasi dan belajar dengan cara-cara yang tidak memaksa (Sign,1998:412-5).

Sejak tahun 1991, konflik sektarian mulai sering terjadi, dan tidak jarang menelan korban manusia. Hal ini karena kelompok Sunni maupun Shia, keduanya sama-sama memiliki kelompok radikal bersenjata. Dalam setiap gerakan partisipasi perempuan sangat diharapkan, namun untuk itu, mereka harus memiliki otonomi dan mobilitas dukungan, baik bagi pengembangan diri maupun komunitasnya. Kondisi ini merupakan paradoks kekuasaan yang dialami oleh gerakan perempuan. Hal ini dapat dilihat pada Revolusi Iran misalnya, yang menunjukkan adanya partisipasi aktif perempuan, namun setelah revolusi berhasil perempuan justru mendapatkan hambatan untuk berpartisipasi pada rana publik. Bagi perempuan kelas menengah, hal ini mendorong mereka mencari cara untuk menyuarakan pandangan yang berbeda dengan lelaki, yang selama ini menjadi dominan dalam gerakan tersebut (Sign,1998:420-1).

Ilustrasi di atas merupakan salah satu contoh bagaimana gender dan etnisitas muncul dalam kasus-kasus tertentu. Asumsi bahwa perempuan bersifat pasif tidak selamanya benar, karena perempuan sebenarnya bergerak walaupun berada pada ruang yang telah dibatasi.

Kasus di atas tampaknya merupakan salah satu gambaran mengenai perempuan dalam konteks identitas agama, yang berhubungan dengan perubahan sosial yang disebabkan oleh masalah politik. Di bawah ini adalah masalah lain yang berhubungan dengan masalah identitas etnis yang berubah atau juga bertahan, walaupun individu yang bersangkutan telah meninggalkan daerahnya.

Hasil penelitian Monisha Das Gupta terhadap imigran India di kota New York, dalam tulisannya yang berjudul "*What is Indian about You?, a Gendered Transnational Approach to Ethnicity*", memperlihatkan bahwa identitas tidak bersifat tetap bahkan setelah generasi keempat (Das Gupta,1997:572). Menurut Das Gupta, pendekatan konvensional terhadap etnisitas umumnya menekankan pada konsep asimilasi, bahwa identitas etnis akan hilang atau kabur karena telah membaaur dengan identitas daerah tujuannya. Penjelasan lainnya adalah identitas etnis selalu bersinambungan dan terjadi pluralitas budaya. Menurut dia kedua pendekatan tersebut tidak peka terhadap keberlangsungan etnisitas, bersifat eurosentrisme dan tidak peka terhadap pengaruh gender dalam etnisitas (Das Gupta,1997:572-3).

Dalam kasus imigran, pendekatan transnasional dianggap lebih relevan, karena, para imigran memiliki dua kerangka berpikir dan bertindak, yaitu kebiasaan dari negara asalnya dan kebiasaan dari negara tujuannya. Melalui pendekatan transnasional ada tiga hal yang bisa menjembatani kekurangan paradigma etnisitas. Pertama, budaya dapat dilihat sebagai hubungan kekuasaan antar gender. Kedua, memberi penjelasan mengenai hilang dan berkesinambungannya identitas etnis dan asumsi yang mengikutinya, yaitu bahwa budaya imigran di Amerika terisolasi dari budaya negara asalnya. Ketiga, melalui pendekatan

transnasional maka terlihat adanya hubungan sejarah antara negara asal dengan negara tujuan para imigran (Ibid:573)

Imigran dari India dapat dikategorikan berdasarkan sejarah kedatangan mereka. Sebelum tahun 1965 umumnya adalah orang Punjabi yang miskin dan bekerja di sektor informal, dan dikategorikan sebagai kelas bawah. Tahun 1965, yaitu sejak Amerika mencabut pelarangan berimigrasi dari Asia ke Amerika, imigran dari India umumnya adalah mereka yang memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman atau keahlian yang memadai. Akibatnya imigran India sejak tahun 1965 bersifat elitis dan memiliki ciri-ciri, “*educated, highly skilled, and urban*” (Das Gupta,1997:576). Imigran setelah tahun 1965, yang pertama kali datang umumnya tidak memiliki keluarga ataupun komunitas. Mereka juga sering mendapat resistensi dari komunitas orang Amerika, berupa pemukulan dan tindak kekerasan lainnya. Pada saat itu komunitas orang Amerika juga tidak familiar mengenai siapa dan bagaimana orang India, sehingga bagi mereka orang India tampak aneh. Dengan bertambahnya populasi orang India, mereka mulai membuat candi/vihara yang tidak hanya berfungsi sebagai alat keagamaan, tetapi juga sebagai arena hubungan sosial sesama orang India (Ibid,576-9).

Keluarga dan orang tua ternyata merupakan agen yang penting dalam proses pelestarian tradisi. Melalui merekalah generasi orang India yang lebih muda mendapatkan sosialisasi mengenai India. Orang tua mengukur keberhasilan sosialisasi berdasarkan kepatuhan anak. Dalam hal ini anak perempuan lebih banyak mendapat sorotan dan larangan daripada anak lelaki. Tindakan sosialisasi dinamakan musiumisasi oleh Das Gupta, karena apabila para imigran tersebut berkunjung ke India maka mereka akan mendapati perilaku sosial yang lebih terbuka dibandingkan dengan negara tempat mereka berimigrasi (Das Gupta,1997:580).

Identitas budaya nasional Amerika ternyata tidak memperhatikan proses adaptasi yang terjadi, sehingga bagaimana identitas dikonstruksikan-pun kurang menjadi perhatian. Para responden yang diteliti (semuanya perempuan) ternyata mengalami pembatasan dalam hubungan sosial mereka, dan anak perempuan orang India masih diharapkan bersikap seperti orang India, dan tidak larut menjadi orang Amerika. Hal ini berbeda dengan perlakuan terhadap anak lelaki, yang lebih bebas dan tidak mendapatkan pembatasan seperti halnya anak perempuan. Para imigran India juga masih mempertahankan pernikahan *in-group*, dan orang tua merupakan agen yang melakukan pemilihan.

Anak perempuan tidak serta merta menerima pembatasan yang demikian, dan mereka melakukan penolakan terhadap pembatasan-pembatasan yang dialami. Penolakan itu dilakukan dengan cara langsung, yaitu memilih sesuatu yang berbeda dengan kehendak orang tua, atau mencari kerja sambil terus melanjutkan pendidikannya, tanpa diketahui oleh orang tuanya. Bagi kebanyakan orang India aktivitas mencari kerja itu merupakan tindakan yang dianggap memalukan karena dianggap memojokkan orang tua yang memiliki pekerjaan dan penghasilan yang

memadai (Das Gupta,1997:584-5). Meskipun demikian anak-anak perempuan itu kemudian menikah dengan orang yang berasal dari Asia Selatan juga, walau ada yang mendapatkannya tanpa melalui proses perjodohan yang dilakukan oleh para orang tua mereka. Anak-anak yang menikah tanpa melalui perjodohan itu tetap dianggap melanggar kebiasaan dan tidak mendapat restu dari orang tua mereka, seperti halnya, anak lelaki yang menikah dengan perempuan Amerika.

Melalui pendekatan transnasional, Das Gupta menerapkan pendekatan *borderlands* dari Anzaldua dan *hybridizing the settled* dari Bhabha (Das Gupta,1997:586-7). Pendekatan ini memungkinkannya melihat adanya perubahan batas dan proses *reinvansi* dari identifikasi yang berhubungan dengan etnisitas. Melalui pendekatan ini dapat diketahui bahwa para responden mulai mengerti adanya dua budaya yang berbeda, dan mereka berusaha untuk tidak mempertentangkan antara keduanya. Pada saat yang sama mereka juga berusaha untuk tidak menekankan pada salah satu pilihan (Ibid:587). Bersamaan dengan itu mereka juga sadar tentang adanya ketegangan yang berhubungan dengan keberadaan dua budaya tersebut, terutama dalam peran ibu mereka dan posisi mereka yang akan menjadi ibu pada masa yang akan datang, yang dituntut memainkan peran yang penting dalam menegakkan apa yang disebut sebagai tradisi India. Para responden memahami tantangan yang akan mereka hadapi, jika mereka berada pada posisi ibu, dan pada saat yang sama mereka ingin pula mengejar impian Amerika dengan mengejar sukses di pekerjaan dan mencapai status ekonomi yang baik. Kecenderungan ini disebut sebagai “*ABCD-American Born Confused Desis (natives)*” (Ibid,587). Ungkapan ini dipergunakan untuk menamakan keturunan India yang mengalami masalah identitas.

Baik *borderlands* maupun *hybridization* menekankan adanya konflik yang berhubungan dengan space dan budaya di mana terus menerus terjadi proses penyesuaian diri (Ibid:588). Pendekatan ini bahkan menekankan adanya batas dan membentuk ‘*third country*’ yang mempengaruhi kesadaran individu yang berada pada batas-batas tersebut. Kesadaran ini kurang diperhatikan oleh pendekatan yang disebut Das Gupta sebagai pendekatan etnisitas.

Pada kenyataannya ‘*third country*’ ini terlihat pada masyarakat Amerika. Menurut Das Gupta, sejarah etnisitas di Amerika dipengaruhi oleh *overlappingnya* konsep etnisitas dengan ras (kulit putih), di mana kelompok India tersisihkan dari peraturan yang ada dalam masyarakat, seperti yang dicontohkan dengan masalah naturalisasi. Di Amerika, orang India sering disebut sebagai American Indian, sebagai pembeda terhadap Indian American. Sebutan ini kurang disukai karena masalah geopolitik di negara asal mereka, dan sebutan Asian Selatan lebih disukai dan dianggap netral, terutama oleh kalangan akademis.

Dengan memasukkan unsur gender, Das Gupta berhasil memperlihatkan adanya hubungan kekuasaan yang berbeda antar gender, yang dipergunakan sebagai cara untuk menunjukkan kelemahan dari

pendekatan paradigma etnisitas. Mengakui perbedaan saja tidak cukup, karena dengan cara seperti itu budaya hanya menjadi '*fetish*' (Das Gupta,1997:591), sehingga mengaburkan adanya proses kekuasaan dan proses adaptasi yang berlangsung pada kelompok-kelompok imigran.

### ***Women of Colour or Third World Women***

Pembahasan berikut adalah penjelasan dalam tingkat abstraksi yang lebih tinggi dengan melihat kajian yang spesifik gender atau perempuan. Pembahasan mengenai gender dan etnisitas terdapat interpretasi yang berbeda dengan melihat kelompok-kelompok yang berbeda. Audre Lorde dalam "*Age, Race, Class and Sex, Women Redefining Difference*", menjelaskan bahwa sebagai *black feminist* dia memiliki persepsi yang berbeda dengan *white feminist* (Lorde di Evans,1994:36). Perbedaan ini muncul karena umumnya gerakan feminis berkembang di Barat, dan pada umumnya melihat pada kelompok perempuan yang berkulit putih. Di Amerika, komunitas di mana Audre Lorde berada, terdapat norma mistis yang membuat individu memiliki kesempatan lebih banyak untuk maju dan sukses, yang terdapat dalam jargon "*white, thin, male, young, heterosexual, Christian and Financially secure*" (Ibid:36).

Menurut Lorde, dalam gerakan perempuan, pengetahuan mengenai perempuan umumnya masih dikuasai oleh perempuan kulit putih yang menekankan adanya penindasan, namun tidak memasukkan unsur kelas, ras dan sebagainya. Pengetahuan tersebut juga menekankan pada homogenitas pengalaman dan masalah yang dihadapi oleh perempuan. Seakan-akan penindasan dan pengalaman perempuan adalah sebuah nilai yang universal dan sama untuk semua perempuan. Posisi ini ditentang oleh Lorde, dengan memperlihatkan pada proses yang menekankan bahwa prosa merupakan bentuk sastra arus utama. Menurut Lorde puisi juga penting karena pembuatannya dipengaruhi oleh kelas individu berada. Mereka yang berasal dari kelas bawah, cenderung menulis dengan pola puisi karena mereka memiliki hambatan ekonomis, dan puisi yang lebih ekonomis dibandingkan dengan prosa (Ibid:37).

Kecenderungan perempuan kulit putih untuk tidak memasukkan unsur *women of colour*, dapat dilihat dari jarangya memasukkan bacaan sebagai *text book*, untuk menjelaskan kategori perempuan kulit berwarna. Menurut Lorde kecenderungan ini merupakan perangkap yang mengaburkan masalah komunitas yang lebih besar. Kehidupan komunitas kulit berwarna di Amerika misalnya, selalu dihadapkan pada tindakan kekerasan yang dialaminya di jalanan. Dengan demikian, masalah yang dihadapi oleh perempuan kulit berwarna di Amerika jauh berbeda dengan perempuan yang berkulit putih. Karena itu keengganan perempuan kulit putih untuk melihat perbedaan ini dengan sendirinya mengaburkan permasalahan yang lebih mendalam. Tanpa mengakui adanya perbedaan akan sulit untuk mengerti realitas yang dihadapi oleh perempuan kulit

berwarna, apalagi untuk membuat analisa yang lebih mendalam mengenai perempuan kulit berwarna.

Audre Lorde menunjukkan masalah etnisitas dan gender yang khas Amerika, namun memiliki dampak yang positif dalam perkembangan pemikiran tentang gender. Kategori perempuan dan gender ternyata tidak dapat disamaratakan, karena ada perbedaan hakiki di antara perempuan itu sendiri. Sejalan dengan Lorde; Abbott dan Wallace menunjukkan bahwa kategori *Black Feminism* lebih tepat digunakan dibandingkan dengan *coloured* yang memiliki konotasi penggunaan di Afrika Selatan. Sedangkan kategori minoritas etnis juga kurang tepat karena kata itu seakan memperlihatkan konteks *inferioritas* sebuah kelompok etnis tertentu. Kategori *Black* disini tidak menunjuk pada perbedaan warna kulit seperti pengertian *black* pada umumnya, melainkan sebuah kategori politik untuk melingkupi semua yang mengalami perlakuan rasisme (Abbott dan Wallace,1997:70-71). Pemahaman ras mengacu pada kenyataan bahwa ras seringkali sulit dibuktikan secara empiris, tetapi ras adalah kategori yang dibentuk, dan dikonstruksikan.

Kategori perempuan kulit berwarna bisa menjadi lebih tajam dengan pendekatan yang melihat sejarah imperialisme Barat. Daiva Stasiulis dan Nira Yuval-Davis menyatakan bahwa pemikiran yang berhubungan dengan etnisitas dan gender (ditambah dengan ras, negara dan kelas) agak terlambat dikembangkan. Menyadari hal tersebut, mereka mengawali dengan analisa melalui kasus-kasus yang berhubungan dengan *settler societies* yang didefinisikan:

*“... as societies in which Europeans have settled, where their decendants have remained politically dominant over indigeneous peoples, and where a heterogenous society has developed in class, ethnic and racial terms, then it becomes clear that ‘settler societies’ must be seen as falling along a continuum rather than wihtin clear and fixed boundaries”* (Stasiulis dan Davis,1995:3)

Ketertarikan mereka pada pengkategorian ini karena *settler societies* merupakan bentuk masyarakat yang disebabkan oleh penjajahan orang Eropa terhadap kelompok pribumi, yang memiliki ciri dominasi. Pada saat ini *settler societies* merupakan tipe dari negara koloni, sesuai dengan perkembangan jaman terjadi gerakan kemerdekaan di daerah itu. Meskipun demikian, yang tidak luput dari pengamatan adalah terjadinya konflik yang berkaitan dengan kelompok migran dan kelompok pribumi, dalam konteks perkembangan kapitalis dan politik yang terjadi di daerah itu (Stasiulis dan Davis,1995:1-3).

Secara umum analisa yang berhubungan dengan *settler societies* dapat dikatakan timpang, karena beberapa hal. Pertama masyarakat dilihat sebagai bagian dari pengaruh budaya kapitalis Eropa, sehingga sejarah dan perkembangan masyarakat pribumi tidak terlihat. Hal ini karena teks sejarah lebih mengandalkan catatan tertulis, padahal pada masyarakat

pribumi, tradisi lisan lebih menonjol. Kedua, perhatian terhadap nilai dan institusi Eropa yang ditranplantasikan di daerah tersebut mengaburkan perkembangan kemasyarakatan yang terjadi seperti perkembangan sosial yang disebabkan oleh perdagangan budak. Ketiga, analisa, yang berhubungan dengan *settler societies* pada umumnya berjangka pendek (abad 19 atau awal 20) dan cenderung terfokus pada pengaruh Inggris terhadap koloninya; padahal terdapat beberapa negara yang memiliki daerah koloni dengan ciri yang berbeda-beda. Keempat, analisa yang dikembangkan pada umumnya hanya melihat satu bentuk hubungan sosial, seperti kelas atau ras, atau bentuk dominasi seperti *centre-periphery*. Analisa seperti ini mengaburkan kompleksitas masalah yang terjadi di daerah itu (Stasiulis dan Davis,1995:4-5).

Dilihat dari sudut pandang perspektif gender, analisa yang tidak memasukkan unsur gender mencerminkan dominasi lelaki pada perkembangan pengetahuan. Padahal penjajahan telah membuat hubungan gender, baik antar kelompok (migran-pribumi) maupun hubungan di dalam kelompok itu sendiri, menjadi sangat kompleks. Hubungan nyonya-pembantu yang cenderung dominan dan hirarkis telah mengaburkan hubungan *egalitarian* yang sesungguhnya merupakan ciri khas dari masyarakat pribumi. Peran perempuan dalam perekonomian juga hilang karena perekonomian perempuan dikategorikan pada ekonomi tradisional, yang dibedakan dengan ekonomi uang yang terutama dipegang oleh lelaki. Secara ideologis, perempuan pribumi juga dirugikan karena nilai dan norma keluarga Barat menjadi nilai dan norma yang diangkat dan disosialisasikan. Sosialisasi ini pada umumnya terjadi sebagai upaya merubah sikap pribumi yang dianggap 'tidak beradab' menjadi beradab (Stasiulis dan Davis,1995:13-14).

Selain itu, perkawinan campur (baik resmi maupun tidak resmi) harus dilihat sebagai tindakan perempuan dalam menyesuaikan diri terhadap proses kolonisasi. Perempuan juga sebagai pihak yang menjembatani antara pedagang Eropa dengan pihak pribumi, dan sebagai penyeimbang antara perubahan nilai dan norma yang terjadi, akibat pengaruh asing dengan nilai dan norma yang dimiliki oleh komunitas setempat. Dilihat dari sudut pandang kepentingan pribumi, maka perempuan juga berperan sebagai objek ideologis, di mana perdebatan mengenai *nation* bertumpu. Karena itu peran yang dimainkan oleh perempuan tidak hanya berfungsi secara sosial, tetapi juga secara politis. Beberapa tokoh perempuan kemudian dijadikan alat untuk mengembangkan identitas karakter bangsa, seperti halnya tokoh Kartini.

Perkembangan jaman kemudian menimbulkan banyak permasalahan baru. Sekitar tahun 80-an misalnya banyak penulis menggambarkan hubungan yang timpang yang dialami oleh pekerja migran perempuan, khususnya dalam hubungan antara keluarga, negara dan pasar. Ciri seperti ini merupakan perubahan yang dramatis dari tulisan sekitar tahun 70-an, yang masih menekankan masalah ketergantungan perempuan dalam rumah tangga, dan keluarga adalah tempat terjadinya ketertindasan

(*Ibid*:14-15). Padahal sebagai pekerja migran masalah perempuan semakin menumpuk, karena sebagai kelompok minoritas dari kelompok yang paling cepat terserap dalam pasar tenaga kerja, umumnya pekerjaan yang dilakukan adalah yang bergaji kecil, tidak aman, tanpa perlindungan dan tidak memiliki serikat pekerja yang kuat (*Ibid*:15).

Kelompok perempuan pribumi pada umumnya dianggap sebagai kelompok yang inferior dan terbelakang, dari kelompok yang terbelakang, yaitu kategori dunia ketiga. Perspektif seperti ini merupakan kritik internal terhadap pemikiran feminis itu sendiri. Pandangan feminis dianggap kurang peka melihat hubungan asimetris yang melibatkan power yang terjadi dalam perspektif feminis, sebagai bagian dari perkembangan geografis yang imperialistik (*Ibid*:16). Kesadaran ini kemudian membangunkan keingintahuan yang lebih besar dengan melihat kategori dunia ketiga sebagai sudut pandang yang khas, yang memperlihatkan perbedaan perspektif dengan pandangan Barat.

Barangkali masalah besar yang menjadi pembicaraan yang menghangat yang menghubungkan gender adalah masalah 'nation'. Menurut Stasiulis dan Davis, pandangan nation seperti yang dikembangkan oleh Hobsbawn yang menekankan kriteria pembentukan nation seperti : 1) adanya hubungan kesejarahan dengan masa lalu, 2) adanya kelompok elit yang melestarikan dokumen tertulis dan administratif, dan 3) adanya kemampuan untuk menjajah, merupakan pandangan *eurocentrisme* yang merugikan kelompok masyarakat dunia ketiga (*Ibid*:19). Dianggap merugikan karena adanya kebiasaan budaya lisan yang dimiliki oleh komunitas-komunitas di negara dunia ketiga. Dalam konteks seperti ini maka pembentukan *nation* di dunia ketiga umumnya dipandang sebagai sebuah konstruksi, dan bukan fenomena esensial (*Ibid*:19). Konstruksi tersebut juga berhubungan dengan perubahan yang terjadi di *mother country* yang juga membahas identitas mereka sendiri. Menurut Stasiulis dan Davis, elit negara berkembang harus menciptakan 'mitos' yang mampu menyatukan mereka, walaupun pada kenyataannya banyak dari kelompok yang ada tidak mengenal mitos itu dengan baik. Menurut Stasiulis dan Davis, salah satu elemen penting yang dikembangkan adalah penekanan pada asal kelompok etnis sebagai bagian dari ideologi nasional. Elemen lain yang dianggap sebagai sumbangan penting adalah adanya tujuan bersama, yang diimplementasikan pada peraturan yang berhubungan dengan batas-batas *nation* itu sendiri, seperti yang dapat dilihat dari peraturan imigrasi dan naturalisasi, yaitu peraturan yang berhubungan dengan pembentukan *boundaries* (*Ibid* 17-20).

Dalam proses pembentukan tersebut, dengan demikian, dapat dibuat kategorisasi diskursus etnis dan ras :

*“Ethnic discourses involves the construction of exclusionary and inclusionary boundaries which draws upon myths of common origin and/or destiny, providing individuals with a mode of interpreting the world based on shared cultural resources and/or collective*

*positioning vis-à-vis other groups. Racial discourses involves modes of exclusion, interiorization, subordination and exploitation” (Stasiulis dan Davis, 1995:20).*

Pada *settler societies*, mereka yang berasal dari keturunan ‘imperialis Eropa’ pada umumnya tidak terintegrasi dengan kelompok pribumi (*Ibid*:20). Kelompok tersebut masih melihat Eropa sebagai mitos dan tanda kesuperioran, meskipun tidak ada hubungan formal maupun informal dengan negara tersebut. Contoh yang paling jelas dari beragam contoh yang diutarakan oleh Stasiulis dan Davis adalah kelompok Aborigin sebagai kelompok pribumi, dengan kelompok yang dinamakan oleh kelompok Aborigin sebagai ‘*imposing society*’, yang masih memegang ciri-ciri hegemoni Eropa sebagai mitos karakter identitas mereka (*Ibid*:21).

Perjalanan pembedaan baik melalui diskursus etnis maupun diskursus ras membentuk kajian dari perspektif kelompok pribumi dan minoritas subaltern (*Ibid* : 26). Pembedaan dan pengakuan terhadap pembedaan tersebut telah berjalan demikian jauh, dan saat ini muncul dalam pembahasan multikulturalisme. Menurut Stasiulis dan Davis, hal ini merupakan ‘cara yang lebih liberal’ dari upaya mempertahankan perbedaan tersebut. Pada kelompok imigran minoritas, multikulturalisme ini sangat berhubungan dengan kepentingan mereka dan juga elit yang mereka miliki. Akan tetapi, kelompok etnis yang hegemonik tidak melihat signifikansi dari multikulturalisme itu sendiri, bahkan beberapa dari mereka menolak dimasukkan dalam pembahasan mengenai multikulturalisme. Di sisi lain, multikulturalisme meniadakan klaim adanya pemilik atau penghuni pertama dari sebuah daerah atau teritori. Selain itu, multikulturalisme juga cenderung menyamaratakan kelompok, dan membuat kategori yang bersifat *mutuali eksklusive* (*Ibid*:26-27). Artinya pandangan multikulturalisme akan mencari agen atau sumber yang dianggap sebagai otentik.

Kelompok perempuan menurut Stasiulis dan Davis, adalah kelompok yang memiliki hubungan yang terjepit di antara multikulturalisme dan partisipasi dalam posisinya sebagai anggota dari kelompok tertentu. Perempuan, misalnya tidak menyukai posisinya yang tertindas dalam kelompok mereka, tetapi memperjuangkan apa yang mereka inginkan, yang ternyata merupakan bagian dari ‘memori, kehinaan dan juga harapan yang dibentuk oleh lelaki’ (Stasiulis dan Davis,1995:27). Dalam perdebatan feminis di Negara Dunia Ketiga, hal ini muncul dalam pembahasan bahwa feminis adalah ideologi yang asing atau ideologi yang musuh.

Menurut Stasiulis dan Davis, perkembangan pembahasan dan perspektif feminis sejak 70 dan 80 an sangat mempengaruhi politik perempuan di *settler societies*. Asumsi bahwa perempuan tertindas, sama rasa dan persaudaraan di antara perempuan (*sisterhood*) tidak dapat diterima begitu saja, karena ternyata situasi perempuan berbeda sesuai

dengan kelompoknya, seperti perempuan dunia ketiga, *black feminist* dan sebagainya. Beberapa dari mereka tidak percaya bahwa feminis sebagai perspektif mampu memberi kemerdekaan bagi perempuan dunia ketiga misalnya, tetapi yang lebih penting adalah melihat pandangan ini sebagai perspektif yang membuka pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan perempuan. Paling tidak menurut Stasiulis dan Davis (mengambil dari Stasiulis, 1993), alat analisa yang mengaitkan masalah perempuan dapat memperlihatkan adanya keterkaitan yang signifikan antara masalah perempuan dengan negara, misalnya. Begitu pula masalah pemberdayaan tidak hanya melulu mengenai kemampuan ekonomi, tetapi juga menyentuh masalah etnis dan kekerasan.

Menurut pandangan Stasiulis dan Davis, kesulitan terbesar adalah membahas kembali pandangan perspektif perempuan yang cenderung bersifat dualistis (lelaki-perempuan). Perspektif dualistis semacam ini, untuk beberapa kasus mampu memperlihatkan masalah esensial yang dihadapi perempuan. Akan tetapi dengan kecenderungannya yang dualistis, pandangan ini juga kurang mampu bereaksi dengan sigap, jika berhadapan dengan masalah heterogenitas perempuan itu sendiri. Perkembangan dari perspektif posmodernisme telah memperkenalkan konsep '*difference*' sebagai salah satu cara untuk menyaring masalah perempuan, tetapi melalui cara itu pula masalah yang berhubungan dengan pola yang simetris dan *power* yang tidak kelihatan.

Lebih lanjut Stasiulis dan Davis mengemukakan, baik juga mencoba mengkaitkan masalah perempuan dengan masalah lain seperti dinamika global, lokal, kekuatan komunitas dan politik perempuan dalam konteks aliansi perempuan internasional. Selain itu perkembangan teknologi yang pesat juga merupakan salah satu kajian yang melihat posisi perempuan, baik sebagai pekerja maupun sebagai perempuan pada umumnya.

Apabila Stasiulis dan Davis telah menyinggung sedikit mengenai masalah multikulturalisme, maka Susan Moller Okin justru mempertanyakan '*Is Multiculturalism Bad for Women*'. Okin memperlihatkan fakta yang diambil dari negara yang berhadapan dengan masalah perpindahan penduduk atau imigrasi. Pada saat perpindahan penduduk terjadi, para migran membawa pula kebiasaan mereka yang tentunya dapat berbeda jauh dibandingkan dengan kebiasaan di negara penerima migran tersebut. Salah satu kebiasaan tersebut adalah poligami, sebagaimana yang dihadapi oleh negara Perancis yang menerima banyak migran Arab (Okin, 1998:1). Kebijakan negara kesejahteraan (*welfare state*) yang dikembangkan di Perancis, hanya mengakui satu isteri saja dengan anak-anaknya. Akibatnya terjadi masalah dengan isteri kedua dan seterusnya, beserta anak-anak mereka. Bahkan tidak jarang terjadi kekerasan karena mereka harus hidup dalam rumah yang terbatas ruangnya (Okin, 1998:1). Selain poligami, para perempuan Arab juga menggunakan jilbab atau penutup kepala dan berpakaian tertutup, sebuah kebiasaan yang jauh berbeda dari kebiasaan berpakaian di Perancis.

Okin mempertanyakan apakah feminisme tidak bertentangan dengan multikulturalisme itu sendiri. Okin mendefinisikan feminisme dan multikulturalisme sebagai berikut

*“By ‘feminisme’, I mean the belief that women should not be disadvantaged by their sex, that they should be recognized as having human dignity equally with men, and the opportunity to live as fulfilling and as freely chosen lives as men can. ‘Multiculturalism’ is harder to pin down, but the particular aspect that concern me here is the claim, made in the context of basically liberal democracies, that minority cultures or ways of life are not sufficiently protected by ensuring the individual rights of their members and as a consequences should also be protected with special group rights or privileges*“(Okin,1998:2).

Menurut Okin, nilai, norma dan budaya yang dibawa oleh sebuah kelompok dipenuhi oleh masalah gender. Aturan budaya yang memposisikan lelaki atau perempuan dalam peran tertentu, menurut pandangan feminis adalah timpang dan bias gender. Dalam pandangan seperti ini, maka sebagian hak-hak kelompok (*group rights*) dapat dilihat sebagai anti feminis (*Ibid*:3).

*Group rights* sendiri terlalu menekankan pada perbedaan antara kelompok-kelompok yang ada, dan kurang memperhatikan perbedaan yang terjadi dalam kelompok itu sendiri. Pandangan yang monolitik ini tidak dapat melihat adanya masalah gender dalam kelompoknya. Selain itu perbedaan yang dimunculkan umumnya adalah perbedaan di ruang publik, dan jarang memperhatikan masalah privat. Padahal pada kategori yang terakhir ini, justru memperlihatkan adanya posisi dilematis antara gender dan budaya. Posisi dilematis tersebut adalah, pertama, masalah reproduksi, pribadi dan seksual. Semua itu merupakan masalah utama dalam setiap budaya, yang muncul dalam aturan pernikahan, perceraian, harta keluarga dan masalah anak (*Ibid*:3). Dengan demikian keluarga merupakan tolok ukur dari masalah keberlanjutan sebuah budaya. Kedua, pada ‘setiap budaya ada aturan yang mengatur perempuan dan lelaki’. Aturan seperti ini masih sangat kentara di Negara Dunia Ketiga, yang umumnya memiliki aturan adat yang bersifat patriarkis. Aturan tersebut sangat tidak memungkinkan bagi perempuan untuk menentukan posisinya sendiri, terutama yang berhubungan dengan reproduksi, seperti keinginan untuk tidak memiliki anak (*Ibid*:4). Aturan tersebut dapat dilihat dari mitos sebagai yang dicontohkan Okin, bahwa Remus dan Romulus dibesarkan oleh binatang dan bukan oleh ibunya sendiri. Menurut Okin hal ini karena perempuan dilihat sebagai manusia yang emosional, tidak dapat dipercaya, dan berbahaya karena memiliki pengaruh seksual. Oleh karena itu orang besar seperti Remus dan Romulus, dalam contoh Okin, tidak dibesarkan oleh perempuan untuk memperlihatkan kebesaran mereka (Okin,1998:3).

Aturan seperti itu juga berhubungan dengan kelompok minoritas, yang menurut Okin lebih patriarkis dibandingkan dengan budaya kelompok di sekitarnya. Ini dapat dilihat pada kehidupan masyarakat Barat, misalnya yang menerapkan permohonan ijin untuk melakukan sholat Jum'at, atau berpakaian Jilbab bagi perempuan Muslim. Pada beberapa kelompok minoritas bahkan terdapat tindakan kekerasan yang tidak dapat ditolerir, seperti pembunuhan istri yang tertangkap basah menyeleweng. Begitu pula pencurian gadis dibenarkan, dengan alasan sebagai bagian dari adat pernikahan suku tertentu. Dalam beberapa kasus, korban tidak hanya perempuan, tetapi juga lelaki. Akan tetapi dalam pembelaan di depan hukum, lelaki lebih diuntungkan karena adanya aturan adat yang dimasukkan. Karena itu lelaki yang dituduh membunuh isterinya karena cemburu atau karena isteri menyeleweng, umumnya mendapatkan keringanan hukuman.

Okin kemudian membedah pemikiran Will Kymlicka yang mencetuskan pemikiran multikulturalisme. Pembedahan ini dianggap penting, karena hanya sedikit penulis yang mencoba menghubungkan masalah gender dengan budaya dalam multikulturalisme. Kymlicka sendiri sebenarnya mengacu pada hak individu yang mengarah pada pemikiran yang liberal, meskipun dia mengajukan pemikiran *group rights*. Dasar pemikirannya adalah individu memiliki *self respect* dan memiliki konteks khusus. Karena sebagai kelompok minoritas, mereka memiliki kemungkinan untuk hilang atau 'musnah'. Meskipun dalam pemikirannya Kymlicka menyatakan bahwa kelompok yang bertindak diskriminatif terhadap perempuan tidak berhak mengajukan *group rights*, namun aturan yang mengontrol masalah seksual sangat sumir dan sulit di buka.

Dengan demikian menurut Okin, *group rights* hanyalah sebagian dari cara memecahkan masalah yang lebih besar. Dalam perspektif feminis, *group rights* mestinya dilihat dalam masalah yang lebih kecil dan privat, karena dalam domain inilah diskriminasi masih terjadi. Itu dapat dilakukan melalui pemilihan perempuan yang dapat mewakili generasi yang lebih muda. Hal itu dianggap sebagai pilihan karena perempuan yang sudah tua umumnya sudah terkooptasi dengan kelompok lelaki, sehingga suara orang muda perempuanlah yang dimasukkan dalam kelompok kecil yang merepresentasikan kelompok minoritas.

## Penutup

Beberapa penjelasan di atas menunjukkan bahwa mengaitkan masalah gender dan etnisitas tidak mudah dilakukan. Pendekatan teoritis mengenai gender juga dipermasalahkan karena pemikiran tersebut umumnya berasal dari kelompok *white middle class*, sehingga jika membicarakan masalah penindasan, maka pendekatan gender tersebut tidak dapat digunakan untuk menjelaskan penindasan yang terjadi pada perempuan kelas bawah. Kasus di Amerika, misalnya menunjukkan bahwa

perempuan kulit berwarna mengalami penindasan dua kali, yaitu oleh lelaki dari kelompoknya sendiri dan dari kelompok kulit putih. Hal ini tentunya berbeda dengan kasus yang ada di negara lain. Penjelasan yang universal tentang hal itu tidak dapat dilakukan karena setiap tempat dan kasus memiliki ciri khasnya masing-masing. Negara yang mengalami kolonialisme misalnya, memiliki masalah yang berbeda dengan negara lain karena struktur sosialnya yang berbeda.

Kajian ini merupakan deskripsi tentang perempuan dari Dunia Ketiga yang berusaha menghadirkan adanya perbedaan konteks sosial politik yang berbeda. Bagi banyak negara Dunia Ketiga, hal ini bukanlah pertanyaan yang mudah dicari jawabannya, karena adanya masalah-masalah yang spesifik bagi komunitas tertentu.

Ada beberapa hal yang dapat ditarik sebagai butir-butir yang penting untuk dikembangkan, baik dari segi pendekatan maupun dari segi penelitiannya. Kasus-kasus yang ada menunjukkan bahwa identitas menjadi masalah yang signifikan dalam masyarakat masa kini. Identitas bisa berkembang menjadi masalah yang pelik karena urusan politik. Di Peshawar, masalah identitas keagamaan tumpang tindih dengan etnis tertentu, yang memiliki 'lawan' dari agama yang berbeda. Sedangkan etnis India di New York mengindikasikan kecenderungan bertahannya ciri-ciri etnis, karena ada agen atau institusi tertentu yang menjaganya, walaupun perubahan terus terjadi. Kemudian tempat di mana perubahan terjadi, perlu merujuk pada lokasi tertentu, berkaitan dengan pengalaman sejarah yang partikular bagi komunitas tertentu, seperti konsep *settler societies*. Dengan cara tersebut, konsep-konsep lain seperti imperialisme, memberikan wawasan yang baik.

Secara umum artikel ini ingin memperlihatkan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat yang heterogen, yang seharusnya menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Ada kecenderungan bahwa setiap kelompok memiliki 'aturan atau kebiasaan' yang mengontrol para perempuan, baik dengan latar belakang agama, etnis maupun kelompok. Lebih jauh lagi, masalah ini memperlihatkan tantangan kajian perempuan supaya permasalahan yang spesifik perempuan dapat dikembangkan.

Masalah perbedaan antara publik dan privat yang menjadi pembeda antara partisipasi lelaki dan perempuan, menjadi dasar analisa yang penting. Pada saat perempuan berada di rana publik, dia terekspose pada berbagai macam perbedaan, dan perempuan sendiri beradaptasi dengan masalah tersebut. Dengan demikian, yang terjadi adalah atas nama kelompok dan kepatutan yang dijalankan oleh perempuan, unsur-unsur kontrol mulai diterapkan. Dengan cara ini perempuan hendak ditarik kembali dalam ruang privatnya.

Adalah menarik untuk memahami proses tarik-menarik ini, terutama karena terjadi pada kelompok perempuan dari Negara Dunia Ketiga, yang masih memiliki ikatan-ikatan primordial. Perubahan akan terus terjadi, sehingga perempuan dari Negara Dunia Ketiga perlu

mempelajari hal ini supaya kecenderungan untuk menarik mereka bisa dipantau. Alasan utama yang mendasari kebutuhan ini adalah keharusan untuk melakukan adaptasi terhadap dunia yang berkembang dan menghindari diri dari posisi yang cenderung menarik diri dari perkembangan tersebut.

### Daftar Pustaka

- Abbott Pamela, and Claire Wallace, 1997, *An Introduction to Sociology, Feminist Perspectives* (2nd edition), Routledge, London.
- Das Gupta Monisha, 1997, "What is Indian About You?" A Gendered Transnasional Approach to Ethnicity, dalam, *Gender and Society*, Vol 11, No 5, October.
- Lorber Judith, and Susan A Farrell (ed), 1991, *The Social Construction of Gender*, London Sage Publication,.
- Lorde Audre, 1994, Age Race, Class and Sex: Women Redefining Difference in Mary Evans (ed) *The Woman Question* (2nd edition), London Sage Publication.
- Okin Susan Moller, 1998, *Is Multiculturalism Bad for Women*, Boston, Boston Review.
- Stasiulis Daiva, Nira Yuval-Davis, 1995, Introduction, Beyond Dichotomies – Gender Race, Ethnicity and Class in Settler Societies, in *Unsettling Settler Societies, Articulation of Gender, Race, Ethnicity and Class, Sage Series on Race and Ethnic Relations*, Vol 11, Sage Publication.
- Sign, 1998, The Power Paradox in Muslim Women's Majales: North-West Pakistani Mourning Rituals as Sites of Contestation Over Religious Politics, Ethnicity and Gender, *Journal of Culture and Society*, Vol 23, No 2, , Chicago, The University of Chicago.